



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## DAMPAK PENGURANGAN IMPORTASI BAWANG PUTIH

**Yosephus Mainake**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[yosephus.mainake@dpr.go.id](mailto:yosephus.mainake@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Harga bawang putih di pasar mulai mengalami peningkatan. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa kenaikan harga bawang putih saat ini disebabkan oleh naiknya harga komoditas tersebut di Tiongkok. Menurutnya, bawang putih merupakan salah satu komoditas pangan yang masih memerlukan tambahan pasokan dari luar negeri untuk memenuhi konsumsi domestik. Akibatnya, kondisi harga komoditas bawang putih di dalam negeri tidak lepas dari pengaruh harga internasional atau harga di negara asal. Saat ini, harga bawang putih di Tiongkok berada di atas US\$1.300 per ton. Hal tersebut turut menyebabkan harga bawang putih di dalam negeri terkerek naik. Berdasarkan Panel Harga Pangan NFA per 29 Mei 2023, harga rata-rata nasional bawang putih di tingkat konsumen berada pada posisi Rp36.875 per kg. kondisi ini mengalami sedikit kenaikan dibanding minggu sebelumnya yang berada di posisi Rp36.340 per kg.

Kenaikan harga komoditas bawang putih disebabkan oleh menipisnya stok dan minimnya pasokan di dalam negeri. Kondisi tersebut diakibatkan oleh terhambatnya proses importasi bawang putih. Hal ini dikarenakan para importir mengalami kesulitan untuk memperoleh Surat Perizinan Berusaha di Bidang Impor (SPBI) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak awal tahun 2023. Para Importir mengeluhkan izin impor untuk bawang putih yang belum keluar hingga berbulan-bulan. Padahal, sekitar 90% kebutuhan bawang putih di Indonesia dipenuhi melalui impor.

Ketua Umum Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Purbarindo), Reinhard Antonius M. Batubara, menyatakan bahwa para importir telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, SPBI tersebut tak kunjung diterbitkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag No. 25 Tahun 2022), izin impor seharusnya diberikan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima. Bahkan, para importir telah tiga kali menyurati Kemendag untuk meminta kepastian terkait penerbitan SPBI komoditas bawang putih. Namun, belum ada surat balasan dari Kemendag terkait permohonan tersebut sampai saat ini.

Merespons kisruh terkait impor bawang putih tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengurangi jumlah impor beberapa komoditas, termasuk bawang putih. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor. Mendag menilai bahwa Indonesia masih belum perlu menambah porsi impor bawang putih karena stok bawang putih masih tersedia hingga saat ini.

Wakil Kepala Satuan Tugas Pangan Polri, Helfi Assegaf, berpendapat bahwa kondisi ini berdampak terhadap stok bawang putih di dalam negeri. Hal ini disebabkan sekitar 90% kebutuhan bawang putih di dalam negeri masih bergantung pada impor. Oleh karena itu, Helfi Assegaf mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan SPBI bawang putih kepada para importir. Ini bertujuan untuk mencegah kenaikan harga bawang putih di dalam negeri.

## Atensi DPR

Pengurangan importasi bawang putih berdampak terhadap kenaikan harga komoditas tersebut. Ini disebabkan oleh minimnya pasokan di dalam negeri karena belum adanya tambahan impor, padahal permintaan bawang putih di dalam negeri cukup tinggi. Sebelumnya, importir bawang putih yang tergabung dalam Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayur Umbi Indonesia (Pusbarindo) menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak lagi mendapatkan Surat Perizinan Berusaha di bidang Impor (SPBI) dari Kemendag sejak 31 Maret 2023. Pusbarindo mengungkapkan stok bawang putih nasional sudah menipis dan membutuhkan tambahan pasokan lagi. Namun, izin impor bawang putih masih tertahan oleh pemerintah. DPR RI, khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan perlu mengawasi berbagai program pemerintah, khususnya Kemendag terkait dengan izin impor bawang putih bagi para importir. Jika ada persyaratan impor dari importir kurang memenuhi, sebaiknya Kemendag transparan dalam memberikan informasi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar proses perizinan dapat berjalan lancar. Harapannya, harga bawang putih di dalam negeri bisa kembali normal seperti sebelumnya.

## Sumber

cnbcindonesia.com, 30 Mei 2023;  
finance.detik.com, 31 Mei 2023;  
kliklegal.com, 31 Mei 2023;  
kontan, 31 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkofficial

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyanti  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023